



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 4 Februari 2021/Periodik - 2020)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
**UNIT KERJA** : BIRO UMUM

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : LILIK HENRY RISTANTO
2. Jabatan : KEPALA BAGIAN
3. NHK : 224480

**II. DATA HARTA****A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 3.372.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 217 m2/180 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000
2. Tanah Seluas 286 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 572.000.000
3. Bangunan Seluas 18.1 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, LAINNYA Rp. 550.000.000
4. Bangunan Seluas 18.1 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, LAINNYA Rp. 550.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/45 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 900.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 95.750.000

1. MOBIL, TOYOTA VIOS SEDAN Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 65.000.000
2. MOTOR, HONDA SUPRA X SEPEDA MOTOR Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 1.750.000
3. MOTOR, YAMAHA XSR Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 29.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 158.420.000**D. SURAT BERTHARGA** Rp. 810.588.920**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 310.187.382**F. HARTA LAINNYA** Rp. 24.053.891

**Sub Total** Rp. 4.771.000.193



III. HUTANG

Rp.

1.019.689.034

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

3.751.311.159

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.